



P R A K A R S A

Welfare Initiative for Better Societies

RESEARCH PAPER

An Analysis of Quality of Life In West Sumatera Province : Using the Z-Score Method with Susenas 2008

@ **Wiko Saputra**

Economic Policy Researcher Perkumpulan PRAKARSA

@ **Rahmah Hida Nurrizka**

Departemen Kesehatan Masyarakat
Pasca Sarjana FKM - UI

May - August 2013

Analisis Kualitas Hidup Masyarakat di Sumatera Barat : Menggunakan Metode Z-Skor dengan Data Susenas 2008

An Analysis of Quality of Life in West Sumatera Province : Using the Z-Score Method with Susenas 2008

Wiko Saputra¹

Perkumpulan PRAKARSA

Rahmah Hida Nurrizka

Departemen Kesehatan Masyarakat
Pasca Sarjana FKM - UI

Abstract : This study is an analysis of how the disparities in development in the area caused a gap in quality of life. By using SUSENAS data 2008 for the region of West Sumatra, to analyze the difference in quality of life in the inequality of development. The methodology for assessing the status of quality of life and the inequality of development using Z-score method. Z-score describes the extent to which the position of an object from the mean measured by the standard deviation. The study showed that the obtained spatial aspects of development disparities between regions in West Sumatra, this is reflected in the differences in regional socio-economic conditions and the achievement of the status of quality of life of each region. Review the status of quality of life is to prove that the two variables are fairly obvious problems in the distribution of development among regions in West Sumatra, namely economic and social problems. The complexity of the issue has caused the emergence of inequality in quality of life among the urban with rural communities in West Sumatra

Keyword : Quality of life, Spatial aspect, Inequality of development

JEL Classification : O15, O18

1. PENDAHULUAN

Ketimpangan pembangunan daerah dapat dikaitkan dengan beberapa aspek yaitu keadaan geografi, ekonomi, sosial, demografi, budaya dan politik. Munculnya ketimpangan pembangunan akan berimplikasi terhadap penataan pembangunan. Salah satu pengaruh dari ketimpangan pembangunan adalah muncul perbedaan dalam pencapaian kualitas hidup di beberapa daerah terutama perbedaan yang terjadi antara kota dengan desa. Selanjutnya secara tidak langsung akan memberi dampak pada pengembangan sumberdaya manusia. Ini sering menjadi persoalan dalam

¹ Jl. Rawa Bambu I Blok A No. 8 – E Rt. 010 Rw. 06, Kel/Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520 Indonesia, email: wiko@theparakarsa.org dan rh.nurrizka@gmail.com

pembangunan (Mubyarto, 2005). Fenomena perbedaan kondisi spasial suatu daerah memperlihatkan perbedaan dalam tingkat kemajuan ataupun kemunduran antar daerah. Perbedaan ini dapat dilihat dari segi pertumbuhan ekonomi daerah, taraf ekonomi masyarakat, taraf kesehatan, dan pendidikan, (Moons, Budts & Geest, 2006; Asmah Ahmad, 1997; Katiman Rostam 1997).

Pada dasarnya, beberapa langkah telah dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pusat untuk mengurangkan jurang ketimpangan pembangunan, namun ketimpangan kualitas hidup tetap terjadi dalam masyarakat baik secara geografi maupun dari segi spasial. Diakui memang, selama ini pemerintah lebih banyak memberi perhatian kepada kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan anggapan bahwa pertumbuhan ekonomi akan menyelesaikan semua persoalan pembangunan manusia. Ternyata pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam masa orde baru, memperbesar ketimpangan antar masyarakat kota dengan masyarakat desa (Noviarti, Wiko Saputra, & Jamaluddin Md. Jahi 2007), begitu juga ketimpangan antar wilayah di mulai dari provinsi, kabupaten/kota maupun kecamatan (UNSFIR, 2005a; UNSFIR, 2005b). Walaupun terdapat kecenderungan adanya peningkatan kemajuan dari daerah yang memiliki kualitas hidup (berkaitan keadaan ekonomi) yang rendah dan cenderung mengejar daerah dengan kualitas hidup yang lebih baik, tetapi tetap saja ketimpangan pembangunan antara daerah terutama kota dan desa masih menjadi persoalan dalam pembangunan di Indonesia pada masa yang akan datang (UNDP, 2002; World Bank, 2003; UNDP, 2004).

Tulisan ini mencoba masuk dalam perdebatan perbedaan status kualitas hidup antara kabupaten/kota di Sumatera Barat, di mana analisis yang dikembangkan menggunakan pendekatan spasial dengan metode Z-Skor. Dengan menggunakan data Susenas 2008 akan digambarkan pencapaian kualitas hidup masing-masing daerah yang akan di kategorikan dalam empat peringkat. Hasil analisis akan memperlihatkan sejauhmana pembangunan selama ini dilakukan telah memunculkan ketimpangan dalam kehidupan masyarakat antar daerah dan

bagaimana pendekatan spatial menjelaskan fenomena tersebut yang ditinjau dari beberapa aspek seperti keadaan geografis, ekonomi dan demografi.

2. KONSEP KUALITAS HIDUP

Kajian mengenai kualitas hidup sudah berkembang dalam beberapa dekade terakhir. Ide awal dari pengukuran kualitas hidup untuk mengetahui sejauhmana sekelompok masyarakat memiliki standarisasi dalam kehidupan yang diukur dari aspek kualitas kehidupan mereka (Cummin, 1999; Liichters, 1996). Pendekatannya bisa bersifat kualitatif maupun secara kuantitatif (Hicks, 1997; Noorbakhsh, 1998; Seik, 2000; Massam, 2002; Dowrick, Dunlop & Quiggin, 2003).

Kajian kualitas hidup berkembang mencakup penilaian dari beberapa aspek kehidupan masyarakat seperti kualitas ekonomi, kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, kualitas lingkungan, dan lainnya. Semakin luas indikator penilaian dengan metode yang baik akan menggambarkan secara holistik kualitas hidup masyarakat (Dann, 1984; Dowrick, Dunlop & Quiggin, 2003).

Dalam perkembangan selanjutnya, kajian mengenai kualitas hidup diperlukan dalam menyusun sebuah perencanaan pembangunan disuatu daerah. Dari aspek perencanaan nanti akan dapat diturunkan menjadi sebuah kebijakan publik (Massam, 2002). *United Nation Development Program (UNDP)* sejak tahun 1990 telah menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai penilaian secara global untuk kualitas hidup. Dimana hasil pengukuran tersebut digunakan untuk menyusun perencanaan pembangunan modal manusia disetiap negara di dunia dan mengambil kebijakan publik baik kebijakan ekonomi ataupun kebijakan sosial (Liichters & Menkhof, 1996; Hicks, 1997; Noorbkhsh, 1998; Morse, 2003; UNDP, 2010).

IPM menyangkut tiga aspek pengukuran. (1) Aspek ekonomi/kesejahteraan yang diukur dari indeks daya beli masyarakat (*purchasing power parity*). (2) Aspek pendidikan yang diukur dari rata-rata lama sekolah seseorang (*mean years of schooling*) dan angka melek huruf. (3) Aspek kesehatan yang diukur dari angka harapan hidup seseorang. Tiga komponen ini yang selalu setiap tahun diukur oleh UNDP untuk mendapatkan kajian terhadap kualitas hidup masyarakat disetiap negara di dunia (Saputra, 2008).

The Economist Intelligence Unit's Index (2005) juga mengukur indeks kualitas hidup untuk menyusun perencanaan pembangunan di suatu daerah. Ada sembilan indikator yang digunakan untuk mengukur indeks kualitas hidup oleh *The Economist Intelligence Unit's Index*. (1) Aspek kesejahteraan yang diukur dari GDP (*Gross Domestic Product*) perkapita. (2) Aspek kesehatan yang diukur dari angka harapan hidup masyarakat. (3) Aspek stabilitas politik dan keamanan yang diukur dari nilai stabilitas politik dan keamanan. (4) Aspek kehidupan keluarga yang diukur dari angka perceraian (per 1.000 penduduk) yang diubah menjadi indeks dari 1 (tingkat perceraian terendah) dan 5 (tingkat perceraian tertinggi). (5) Aspek kehidupan masyarakat yang diukur dari variabel dummy dengan nilai 1 untuk negara/daerah tertinggi tingkat kehadirannya di tempat peribadahan dan nilai 0 untuk yang rendah. (6) Aspek iklim dan geografis yang diukur dari garis lintang yang membedakan iklim hangat dan dingin. (7) Aspek pekerjaan yang diukur dari tingkat pengangguran. (8) Aspek kebebasan berpolitik yang diukur dari rata-rata indeks kebebasan politik masyarakat sipil. (9) Aspek kesetaraan gender yang diukur dari rasio pendapatan rata-rata laki-laki dengan perempuan.

Dowrick, Dunlop & Qiggin (2003) dalam studinya mencoba mengkritik cara penilaian kualitas hidup dengan menggunakan indikator GDP perkapita sebagai salah satu indikator penilaian kualitas hidup suatu negara. Menurut Dowrick, Dunlop & Qiggin (2003), penggunaan GDP perkapita bersifat parsial dengan mengakumulasikan output ekonomi secara agregatif. Ini sangat bias dalam penilaian nantinya. Suatu kondisi ekonomi tumbuh dengan baik, karena

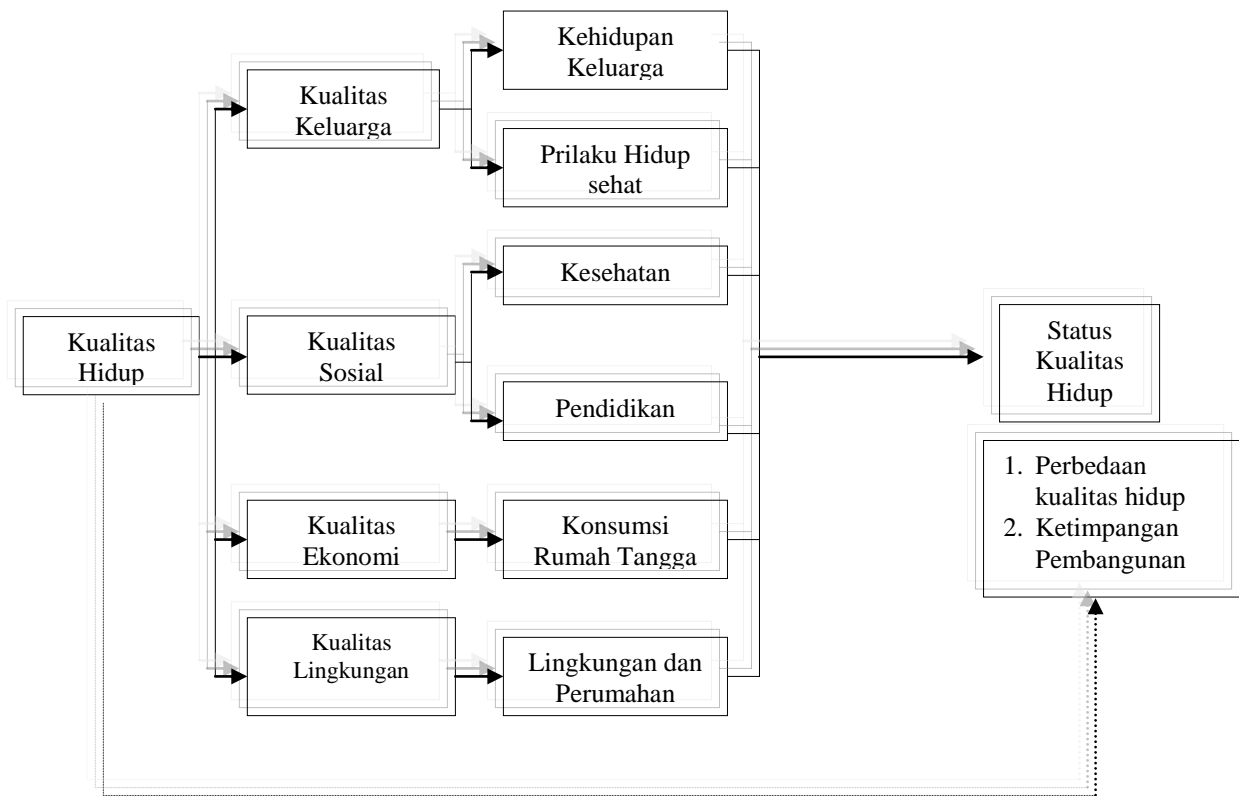
peningkatan sektor industri. Tumbuhnya sektor industri mendorong peningkatan GDP perkapita masyarakat. Tapi juga meningkatkan polusi lingkungan akibat industri semakin berkembang. Sehingga kualitas lingkungan menjadi tidak baik dan menyebabkan resiko kesehatan masyarakat menjadi tinggi. Baik output industri dan peningkatan pengeluaran kesehatan akan meningkatkan GDP secara agregatif. Artinya, peningkatan kesejahteraan masyarakat belum tentu meningkatkan kualitas kesehatan dan kehidupan sosial masyarakat.

Disini kita dapat menyimpulkan bahwa penggunaan salah satu indikator akan menjadi bias bila tidak dikompilasi dengan indikator lain dari kualitas hidup. Boleh saja penilaian kualitas kesejahteraan diukur dari GDP perkapita tapi perlu dikompilasi dengan kualitas kesehatan, kualitas pendidikan, kualitas lingkungan dan lainnya, sehingga menghasilkan suatu penilaian kualitas hidup yang lebih baik (Noorbkhsh, 1998; Seik, 2000; Dowrick, Dunlop & Quiggin, 2003; Saputra, 2008).

3. METODOLOGI

3.1. Indikator Pengukuran Kuallitas Hidup

Kualitas hidup dalam kajian ini mencangkup empat komponen yaitu kualitas keluarga, kualitas sosial, kualitas ekonomi dan kualitas lingkungan perumahan. Selanjutnya empat komponen kualitas dapat diturunkan menjadi tujuh variabel yaitu kehidupan keluarga, prilaku hidup sehat, kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, pendapatan dan lingkungan. Sebanyak 18 variabel digunakan bagi mengukur status kualitas hidup masyarakat Sumatera Barat mengikut Kabupaten/Kota. Gambar 1 menunjukkan kerangka konseptual kajian ini.



Gambar 1. Kerangka Konsep Kajian

Sebelum masuk ke dalam analisis kualitas hidup masyarakat terlebih dahulu dijelaskan komponen-komponen dan variabel-variabel kualitas hidup yang terdiri daripada empat komponen yaitu kualitas keluarga, kualitas sosial, kualitas ekonomi dan kualitas lingkungan perumahan.

1. Kualitas Keluarga (Q_FAMILY)

Dalam kajian ini, komponen kualitas hidup diukur dengan menggunakan dua variabel yaitu prilaku hidup sehat dan kehidupan keluarga. Prilaku hidup sehat dilihat dari pola konsumsi konsumsi rumah tangga. Di mana ada empat variabel pola hidup sehat masyarakat yaitu (1) konsumsi ikan yang merupakan kandungan protein hewani, (2) konsumsi telur dan susu yang juga memiliki kandungan protein hewani dan nabati, (3) konsumsi sayuran yang memiliki kandungan vitamin terutama vitamin A, B, D dan E dan (4) konsumsi buah-buahan yang kaya akan vitamin C. Semua konsumsi ini mencerminkan kandungan protein dan vitamin yang mampu meningkatkan fisiologi tubuh manusia untuk hidup sehat. Sedangkan kehidupan keluarga diukur dari dua indikator yaitu (1)

jumlah anggota rumah tangga, ini mencerminkan bahwa semakin kecil anggota rumah tangga diperkirakan tingkat kesejahteraan dan kehidupan keluarga lebih baik, karena ini akan berkaitan dengan beban tanggungan keluarga dan (2) waktu luang, ini menjadi indikasi bahwa keluarga yang sejahtera cenderung memanfaatkan waktu luang untuk perjalanan rekreasi.

2. Kualitas Sosial (Q_SOCIALI)

Kualitas sosial diukur dari dua komponen yaitu kualitas pendidikan dan kualitas kesehatan. Secara rasional semakin baik keadaan pendidikan dan kesehatan masyarakat semakin baik kualitas hidup masyarakat. Kualitas pendidikan selanjutnya diukur dari (1) pendidikan kepala keluarga yaitu semakin baik pendidikan kepala keluarga semakin baik kualitas hidup keluarga dan begitu pula sebaliknya dan (2) jumlah pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan anak yang menunjukkan komitmen keluarga akan perbaikan kualitas anak yang akan berpengaruh terhadap perbaikan kualitas masyarakat yang akan datang. Kualitas kesehatan diukur dari (1) sumber air minum masyarakat. Ini akan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Air minum yang baik akan memperbaiki kesehatan masyarakat dan begitu juga sebaliknya. (2) jumlah rata-rata pengeluaran kesehatan. Semakin besar investasi masyarakat untuk kesehatan semakin baik pengaruhnya terhadap kualitas hidup masyarakat.

3. Kualitas Ekonomi (Q_ECO)

Untuk mengukur kualitas ekonomi masyarakat digunakan variabel pengeluaran rumah tangga. Variabel ini digunakan kerana data Susenas sangat terstruktur menanyakan variabel ini dalam kuisisioner. Sehingga hasil yang didapat sangat mewakili sekali keadaan sosial-ekonomi rumah tangga. Sedangkan persoalan yang lebih spesifik untuk mengetahui tingkat ekonomi rumah tangga seperti pendapatan tidak begitu terstruktur ditanyakan pada modul Susenas sehingga sukar menggunakan data ini sebagai variabel ekonomi rumah tangga.

4. Kualitas Lingkungan Perumahan (Q_ENV)

Ada hubungan antara kualitas hidup masyarakat berhubungan dengan keadaan lingkungan dan perumahan. Lingkungan dan perumahan yang baik mencerminkan kualitas hidup yang juga baik. Dalam kajian ini, variabel lingkungan perumahan diukur dalam lima subvariabel: (1) status kepemilikan bangunan. Ini mencerminkan seberapa mampu masyarakat untuk memiliki rumah sendiri. Semakin besar peluang masyarakat untuk memiliki rumah sendiri semakin mencerminkan tingkat kesejahteraan atau sebaliknya; (2) jenis atap terluas. Ada sebuah pandangan bahwa rumah yang baik (secara fisik dan kesehatan) memiliki jenis atap yang baik (beton, genteng atau seng) sehingga variabel ini dapat mencerminkan kualitas rumah masyarakat; (3) jenis dinding terluas. Sama halnya dengan jenis atap terluas, jenis dinding terluas juga mencerminkan kualitas rumah masyarakat; (4) status pembuangan limbah. Kualitas lingkungan rumah yang baik memiliki tempat pembuangan limbah akhir tersendiri begitu pula sebaliknya bila tidak ada pembuangan limbah akhir maka ini mencerminkan bahwa secara kualitas lingkungan dan perumahan tersebut tidak baik; dan (5) sumber penerangan. Selanjutnya untuk sumber penerangan ini mencerminkan keadaan ekonomi dari lingkungan dan perumahan. Daerah yang maju secara ekonomi memiliki fasilitas terhadap sumber penerangan listrik dan sebaliknya, jika penerangan listrik tidak ada maka daerah tersebut dapat dikatakan daerah marginal dalam pembangunan karena hampir sebagian besar daerah telah dapat diakses oleh fasilitas listrik. Selain itu ini juga mencerminkan keadaan ekonomi rumah tangga.

3.2. Pengukuran Kualitas Hidup dengan Metode Z Skor

Untuk menggambarkan kedudukan relatif daripada kualitas hidup masing-masing kabupaten/kota maka analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif menggunakan Z-Skor. Z-Skor dalam penelitian bisa digunakan dalam metode kualitatif dan metode kuantitatif. Dalam bidang kesehatan, Z-Skor digunakan untuk mengukur kualitas gizi balita (WHO, 2010). Di dalam studi perbankan, metode Z-Skor digunakan untuk menilai dan

mengevaluasi kinerja perbankan terutama menyangkut analisis kebangkrutan perbankan (Willey, Johns & Sons, 1983; Aggraeni, Silvia & Sugiharto, 2004; Pardede, 2008). Dalam kajian kualitas hidup, metode Z-Skor telah dikembangkan untuk menganalisis sejauhmana kualitas hidup masyarakat dalam suatu daerah tertentu yang dilihat dari berbagai indikator seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan lainnya (Carley, 1981; Awang, 2006; Noviarti, Wiko Saputra & Noor, 2008)

Z-Skor menggambarkan sejauhmana kedudukan suatu objek dari mean diukur daripada standar deviasinya. Melalui kaedah nilai semua variabel telah distandarlisasi dalam bentuk Z-Skor sehingga membolehkan kita membandingkan antara variabel dalam kualitas hidup yang memiliki skala pengukuran yang berbeda satuannya (Carley, 1981; Kendrick, 2005; Awang, 2006). Z-Skor digunakan untuk mengetahui lebih detail dimana posisi suatu skor dalam suatu distribusi. Posisi dalam suatu distribusi itu sendiri ditunjukkan dengan simbol +/- yang menunjukkan bahwa kalau positif berada di atas mean dan kalau negatif menandakan sebaliknya. Z-skor juga memberi tahu berapa jarak skor itu sendiri dengan mean. Z-Skor hanya didefinisikan jika ada yang tahu parameter populasi, seperti dalam pengujian standar, jika satu-satunya memiliki seperangkat sampel, maka perhitungan analog dengan mean sampel dan hasil sampel standar deviasi (Awang, 2006; Noviarti, Wiko Saputra & Noor, 2008)

Dalam statistik, skor standar deviasi menunjukkan berapa banyak standar pengamatan atau berada di atas atau di bawah rata-rata. Ini adalah jumlah yang berdimensi diturunkan dengan mengurangi rata-rata populasi dari nilai mentah individu dan kemudian membagi perbedaan dengan deviasi standar populasi. Secara umum, Z-Skor dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \dots\dots\dots 1$$

Dimana :

Z adalah nilai Z-Skor,

X adalah skor mentah yang telah menjadi standard,

μ adalah mean populasi

σ adalah deviasi standard deviasi.

3.3. Data Susenas 2008

Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2008 merupakan survey yang dirancang untuk mengumpulkan data sosial kependudukan yang relatif sangat luas cakupannya seperti pendidikan, kesehatan, gizi, perumahan, lingkungan hidup, kegiatan sosial budaya, konsumsi, pendapatan rumah tangga, perjalanan dan pendapatan masyarakat mengenai kesejahteraan. Dari data Susenas 2008 dapat memantau berbagai aspek sosial masyarakat seperti taraf kesejahteraan, kondisi kesehatan, tingkat pendidikan dan model konsumsi dan pendapatan masyarakat. Selain itu data Susenas 2008 juga memberikan ruang bagi peneliti untuk mengkaji berbagai aspek sosial lainnya seperti pengukuran terhadap kualitas hidup masyarakat.

Dengan menggunakan data Susenas 2008, kajian kualitas hidup dapat dikembangkan menjadi lebih baik karena beberapa indikator kualitas hidup tersedia cukup lengkap dalam data ini. Selanjutnya sampel dari data Susenas juga cukup besar untuk dianalisis sehingga kajian ini akan lebih menarik untuk menggambarkan tingkat kualitas hidup masyarakat.

Dalam penelitian ini, data Susenas yang digunakan adalah data Susenas untuk Propinsi Sumatera Barat². Dimana populasi referensi dalam menghitung Z-Skor mengacu pada sampel keseluruhan dalam data Susenas untuk Propinsi Sumatera Barat. Lalu data ini di tabulasi menurut data Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Dari data inilah nantinya akan didapatkan tingkat

² Ada tiga kabupaten baru yaitu Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Solok Selatan yang datanya digabungkan dengan kabupaten lama karena sampelnya tidak mencukupi untuk dianalisis.

penilaian kualitas hidup masyarakat di Sumatera Barat menurut Kabupaten/Kota, indikator dan sub indikator sesuai tujuan dari penelitian ini.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Kualitas Hidup Masyarakat Menurut Variabel dan Komponen

Hasil temuan pencapaian kualitas hidup masyarakat Sumatera Barat mengikut petunjuk dan sub variabel di paparkan pada Tabel 1 dan Tabel 2. Terdapat 15 sub variabel menunjukkan variasi, sedangkan terdapat tiga sub variabel tidak menunjukkan variasi dengan kata lain dapatannya sama dengan nilai mean. Kemudian pencapaian kualitas hidup akan dilihat mengikut petunjuk pada Tabel 3. Nilai Z-Skor 5 variabel pada masing kawasan menunjukkan variasi, sedangkan satu variabel tidak berbeda (nilainya sama dengan mean). Penilaian Z-Skor akan dilihat apabila hasil dari nilai Z-Skor diatas 0 menggambarkan pencapaian kualitas hidup yang lebih baik. Sebaliknya nilai Z-Skor dibawah 0 (minus) menggambarkan kualitas hidup yang kurang baik. Artinya terdapat menjauhi nilai mean dari pada sub variabel. Bila dilihat dari Tabel 3, empat variabel yang ada, pencapaian kualitas hidup masyarakat Sumatera Barat ditinjau dari variabel lingkungan (5 sub variabel) pencapaian kualitas hidupnya paling baik berbanding tiga variabel lainnya. Ini terlihat kuantitas daripada taburan nilai Z-Skor diatas nilai 0 pada masing-masing daerah. Hanya lima daerah yang mendapati nilai Z-Skor minus.

Sementara untuk nilai Z-Skor variabel sosial paling buruk berbanding variabel lain. Begitu juga dengan Z-Skor variabel ekonomi. Ini terlihat dari nilai Z-Skor variabel, didapati 6 daerah mendapati nilai Z minus atau dengan kata lain dibawah nilai mean. Temuan ini boleh dikatakan bahwa pencapaian kualitas sosial diikuti kualitas ekonomi daerah-daerah di Sumatera Barat paling rendah berbanding komponen lainnya. Kenyataan ini diperlihatkan oleh variabel kesehatan. Hanya lima daerah yang memiliki nilai Z-Skor diatas 0 (didas nilai mean) dan 11

daerah lainnya memiliki nilai Z-Skor dibawah 0. Begitu juga dengan variabel pendidikan dan ekonomi, hanya 6 daerah yang mendapati nilai Z-Skor diatas nilai 0 (nilai rata-rata).

Tabel 1. Z-Skor Kualitas Hidup menurut Sub Indikator

KAB/KOTA	Z-SKOR (BUILD) (1)	Z-SKOR (ROOF) (2)	Z-SKOR (WALL) (3)	Z-SKOR (TOILT) (4)	Z-SKOR (LIGHT) (5)	Z-SKOR (MEMBER) (6)	Z-SKOR (RECR) (7)	Z-SKOR (FISH) (8)	Z-SKOR (EGG) (9)
Kab. Mentawai	0.25000	0	-2.56174	-1.67705	-3.75000	0	0	0.20189	-0.97635
Kab. Pesisir Selatan	0.25000	0	0.36596	0.55902	0.25000	0	0	0.20189	-2.39649
Kab. Solok	0.25000	0	0.36596	0.55902	0.25000	0	0	-1.41325	-0.97635
Kab. Sawahlunto.Sjj	0.25000	0	0.36596	0.55902	0.25000	0	0	-1.41325	0.44379
Kab. Tanah Datar	0.25000	0	0.36596	0.55902	0.25000	0	0	-1.41325	0.44379
Kab. Pdg Pariaman	0.25000	0	0.36596	0.55902	0.25000	0	0	0.20189	-0.97635
Kab. Agam	0.25000	0	0.36596	0.55902	0.25000	0	0	0.20189	0.44379
Kab. 50 Kota	0.25000	0	0.36596	-1.67705	0.25000	0	0	0.20189	0.44379
Kab. Pasaman	0.25000	0	-2.56174	-1.67705	0.25000	0	0	0.20189	-0.97635
Kota Padang	0.25000	0	0.36596	0.55902	0.25000	0	0	1.81704	0.44379
Kota Solok	0.25000	0	0.36596	0.55902	0.25000	0	0	0.20189	0.44379
Kota Swahlunto	0.25000	0	0.36596	0.55902	0.25000	0	0	-1.41325	0.44379
Kota Pdg Panjang	0.25000	0	0.36596	0.55902	0.25000	0	0	0.20189	0.44379
Kota Bukittinggi	-3.75000	0	0.36596	0.55902	0.25000	0	0	0.20189	1.86394
Kota Payakumbuh	0.25000	0	0.36596	0.55902	0.25000	0	0	0.20189	0.44379
Kota Pariaman	0.25000	0	0.36596	-1.67705	0.25000	0	0	1.81704	0.44379

(sambungan).....

KAB/KOTA	Z-SKOR (VEGT) (10)	Z-SKOR (FRUIT) (11)	Z-SKOR (EXPEND) (12)	Z-SKOR (FOOD) (13)	Z-SKOR (NONFOOD) (14)	Z-SKOR (EDU) (15)	Z-SKOR (EXPDEDU) (16)	Z-SKOR (WTR) (17)	Z-SKOR (EXHEALT) (18)	Z-SKOR (AVERAGE)
Kab. Mentawai	0.55902	-2.14795	-1.55356	-0.85391	-0.69108	-0.77326	0.55902	-1.36931	-2.22083	-1.97665
Kab. Pesisir Selatan	0.55902	-0.77326	-1.55356	-0.85391	-0.69108	0.60143	0.55902	-1.36931	1.00947	-0.71997
Kab. Solok	0.55902	-0.77326	-0.42370	-0.85391	-0.69108	-0.77326	0.55902	0.00000	1.00947	-0.51052
Kab. Sawahlunto.Sjj	0.55902	0.60143	-0.42370	-0.85391	-0.69108	-0.77326	0.55902	0.00000	-0.60568	-0.30108
Kab. Tanah Datar	0.55902	0.60143	-0.42370	-0.85391	-0.69108	-0.77326	0.55902	0.00000	-0.60568	-0.30108
Kab. Pdg Pariaman	-1.67705	-0.77326	-0.42370	-0.85391	-0.69108	-0.77326	0.55902	0.00000	-0.60568	-0.71997
Kab. Agam	0.55902	-0.77326	-0.42370	1.09789	-0.69108	-0.77326	0.55902	0.00000	-0.60568	-0.09163
Kab. 50 Kota	0.55902	-0.77326	-0.42370	-0.85391	-0.69108	-0.77326	0.55902	-1.36931	-0.60568	-0.71997
Kab. Pasaman	0.55902	-0.77326	-0.42370	-0.85391	-0.69108	-0.77326	-1.67705	-1.36931	1.00947	-1.13886
Kota Padang	0.55902	0.60143	0.70617	1.09789	1.76610	1.97611	-1.67705	0.00000	-0.60568	1.16504
Kota Solok	-1.67705	0.60143	0.70617	1.09789	0.53751	0.60143	0.55902	1.36931	-0.60568	0.74615
Kota Swahlunto	-1.67705	0.60143	0.70617	-0.85391	0.53751	0.60143	0.55902	0.00000	-0.60568	0.11781
Kota Pdg Panjang	0.55902	0.60143	1.83603	1.09789	1.76610	1.97611	-1.67705	1.36931	1.00947	1.58394
Kota Bukittinggi	-1.67705	1.97611	1.83603	1.09789	1.76610	0.60143	-1.67705	1.36931	1.00947	1.37449
Kota Payakumbuh	0.55902	0.60143	0.70617	1.09789	0.53751	0.60143	0.55902	1.36931	1.00947	1.16504
Kota Pariaman	0.55902	0.60143	-0.42370	1.09789	-0.69108	-0.77326	0.55902	0.00000	1.00947	0.32726

Sumber : diolah dari Data Raw Susenas 2008

Tabel 2. Kualitas Hidup menurut Indikator

Kabupaten/Kota	Z-Skor (ENV)	Z-Skor (FAMILY)	Z-Skor (BHV)	Z-Skor (ECO)	Z-Skor (EDU)	Z-Skor (HEALTH)
Kab. Mentawai	-2.79508	0	-1.2888	-1.1706	-0.519	-2.1833
Kab. Pesisir Selatan	0.55902	0	-1.2888	-1.1706	1.14188	-0.3447
Kab. Solok	0.55902	0	-1.2888	-0.6777	-0.519	0.5746
Kab. Sawahlunto.Sjj	0.55902	0	0.08592	-0.6777	-0.519	-0.3447
Kab. Tanah Datar	0.55902	0	0.08592	-0.6777	-0.519	-0.3447
Kab. Pdg Pariaman	0.55902	0	-1.2888	-0.6777	-0.519	-0.3447
Kab. Agam	0.55902	0	0.08592	-0.1848	-0.519	-0.3447
Kab. 50 Kota	-0.55902	0	0.08592	-0.6777	-0.519	-1.264
Kab. Pasaman	-1.67705	0	-0.6014	-0.6777	-2.1799	-0.3447
Kota Padang	0.55902	0	1.4606	1.29377	1.14188	-0.3447
Kota Solok	0.55902	0	0.08592	0.8009	1.14188	0.5746
Kota Sawahlunto	0.55902	0	-0.6014	0.30804	1.14188	-0.3447
Kota Pdg Panjang	0.55902	0	0.77326	1.78663	1.14188	1.4938

Sumber : diolah dari Data Raw Susenas 2008

Tabel 3. Kualitas Hidup menurut Komponen

Kabupaten/Kota	Z-Skor (Q_ENV)	Z-Skor (Q_FAMILY)	Z-Skor (Q_ECO)	Z-Skor (Q_SOCIAL)
Kab. Mentawai	-2.79508	-1.2888	-1.1706	-1.9184
Kab. Pesisir Selatan	0.55902	-1.2888	-1.1706	0.22307
Kab. Solok	0.55902	-1.2888	-0.6777	0.22307
Kab. Sawahlunto.Sjj	0.55902	0.0859	-0.6777	-0.4908
Kab. Tanah Datar	0.55902	0.0859	-0.6777	-0.4908
Kab. Pdg Pariaman	0.55902	-1.2888	-0.6777	-0.4908
Kab. Agam	0.55902	0.0859	-0.1848	-0.4908
Kab. 50 Kota	-0.55902	0.0859	-0.6777	-1.2046
Kab. Pasaman	-1.67705	-0.6014	-0.6777	-1.2046
Kota Padang	0.55902	1.4606	1.29377	0.22307
Kota Solok	0.55902	0.0859	0.8009	0.9369
Kota Sawahlunto	0.55902	-0.6014	0.30804	0.22307
Kota Pdg Panjang	0.55902	0.7733	1.78663	1.65073

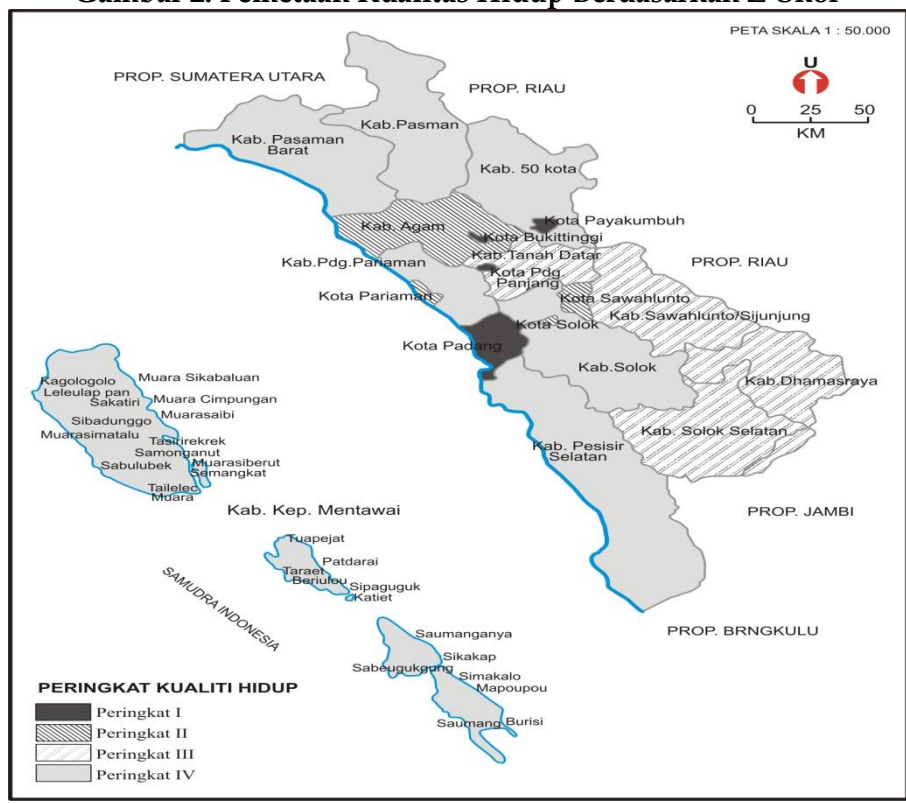
Sumber : diolah dari Data Raw Susenas 2008

4.2. Kualitas Hidup Masyarakat Menurut Kabupaten Kota

Pada bagian sebelumnya telah dipaparkan bagaimana pencapaian kualitas hidup masyarakat Sumatera Barat mengikut sub variabel, variabel dan komponen. Berikutnya akan dianalisis bagaimana pencapaian kualitas hidup secara agregatif masing-masing daerah ditinjau secara spatial (Gambar 2). Pada Gambar ini terlihat bahwa pencapaian kualitas hidup tertinggi terdapat pada daerah Kota Padang Panjang sedangkan pencapaian kualitas hidup paling rendah ditemui di daerah Kabupaten Mentawai. Selain itu juga terlihat bahwa ada beberapa daerah yang status pencapaiannya sama seperti Kota Padang dengan Payakumbuh, Kabupaten Sawahlunto

dan Tanah Datar dan juga Kabupaten Pesisir Selatan dengan 50 Kota dan Kabupaten Padang Pariaman. Untuk memberikan memudahkan analisis maka kualitas hidup masing-masing daerah dikelompokkan dalam empat kategori sehingga daerah-daerah dengan karakteristik yang hampir sama akan mendekati pada satu kategori. Kemudian ini juga akan memudahkan tinjauan secara geografis menurut letak daerah. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan melalui Peta di bawah ini.

Gambar 2. Pemetaan Kualitas Hidup Berdasarkan Z-Skor



Sumber : diolah dari Data Raw Susenas 2008

Tabel 4. Z-Skor Rata-rata Pencapaian Kualitas Hidup menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Z-Skor (Rata-rata)	Kumpulan (4 Persentil)
Kab. Mentawai	-1.97665	IV
Kab. Pesisir Selatan	-0.71997	IV
Kab. Solok	-0.51052	III
Kab. Sawahlunto.Sjj	-0.30108	III
Kab. Tanah Datar	-0.30108	III
Kab. Pdg Pariaman	-0.71997	IV
Kab. Agam	-0.09163	II
Kab. 50 Kota	-0.71997	IV
Kab. Pasaman	-1.13886	IV
Kota Padang	1.16504	I
Kota Solok	0.74615	II
Kota Sawahlunto	0.11781	II
Kota Pdg Panjang	1.58394	I
Kota Bukittinggi	1.37449	I
Kota Payakumbuh	1.16504	I
Kota Pariaman	0.32726	II

Sumber : diolah dari Data Raw Susenas 2008

4.3. Kualitas Hidup Peringkat Pertama: Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Dan Kota Payakumbuh

Keempat daerah ini secara tidak langsung merupakan gambaran daerah yang mempunyai status kualitas hidup yang terbaik di Sumatera Barat berbanding 12 daerah lain. Ini terlihat dari pencapaian Z-Skor kualitas lingkungan ekonomi dan sosial berada pada taraf empat tertingi. Secara umum, keempat daerah ini memiliki derajat perkotaan yang cukup tinggi dan ketersediaan fasilitas ekonomi dan sosial. Secara geografis, tiga wilayah ini merupakan daerah dengan luas yang lebih kecil dibanding daerah-daerah lain di Sumatera Barat. Luasnya hanya 0.06% (Bukittinggi) dan 0.05% (Padang Panjang), Kota Payakumbuh (0.18%) dan Padang (1.2%) dari total keluasan wilayah Sumatera Barat. Pada dasarnya Kota Padang, Kota Payakumbuh masuk kategori daerah perkotaan. Kota Padang merupakan ibu kota Sumatera Barat yang menjadi pusat pertumbuhan utama di Sumatera Barat disamping Kota Bukittinggi Implikasi dari keadaan ini adalah dari segi pendidikan, tata ruang dan ketersediaan infrastruktur akan memberikan kemudahan dalam pengurusan dalam suatu sistem yang baik (Katiman Rostam & Abdul Hamid Abdullah 1997).

Kota Bukittinggi memiliki corak daerah yang merupakan daerah perdagangan, yang disokong dengan banyaknya industri skala kecil hingga menengah, pariwisata dan sektor pendidikan. Secara historis Kota Bukittinggi sejak zaman kemerdekaan sudah menjadi kawasan pusat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat, dimana sektor perdagangan berkembangnya dengan pesat dan menggerakkan pembangunan ekonomi yang lain seperti industri dan pendidikan. Kondisi ini diperkuat dengan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai 5.78% pertahun yaitu diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Keadaan ini secara tidak langsung membuka peluang pekerjaan yang cukup besar bagi masyarakat dikawasan ini, sehingga berpengaruh positif terhadap tingkat ekonomi penduduk. Keadaan ini sejalan dengan hasil sensus kemiskinan tahun 2005, dimana angka kemiskinan didaerah ini tergolong rendah (Elfindri & Wiko Saputra, 2005).

Lain halnya dengan Kota Padang Panjang. Daerah ini pada dasarnya memiliki karakteristik pertanian dan peternakan. Disamping itu juga didukung dengan berkembangnya industri kecil dan menengah bidang pertanian dan peternakan. Kota Payakumbuh secara geografis daerah ini masih bercorak pertanian, namun tidak bergantung pada aktivitas pertanian saja melainkan aktivitas industri dan perdagangan yang cukup menonjol di daerah ini sehingga sehingga secara fisik, daerah ini tergolong maju. Apalagi letaknya berdekatan dengan pusat pertumbuhan utama.

Secara geografis letak kedua daerah ini berdekatan dengan kawasan pusat pertumbuhan ekonomi seperti Kota Bukittinggi dan Kota Padang sehingga memberikan pengaruh terhadap kemajuan daerah. Selain itu daerah ini juga disokong oleh fasilitas infrastruktur jalan yang baik sehingga mobilitas masyarakat lebih tinggi pada pusat aktivitas sosial maupun ekonomi. Keadaan ini membuktikan bahwa mobilitas masyarakat dapat meningkatkan status kualitas hidup masyarakat.

4.4. Status Kualitas Hidup Peringkat Kedua: Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Pariaman Dan Kabupaten Agam

Secara geografis keempat daerah tersebut memiliki karakteristik pertanian yang juga merupakan bahagian yang dominan sebagai mata pencaharian masyarakat. Disamping itu sektor industri kecil menengah juga berkembang di daerah ini sehingga mampu menjadi mata pencaharian ekonomi masyarakat. Begitu juga dengan Kota Sawahlunto merupakan kawasan pertambangan yang kaya dengan bahan galian batubara sehingga memberikan peluang pekerjaan di sektor pertambangan. Secara administratif pada dahulunya daerah Kota Solok, Kota Kawahlunto dan Kota Pariaman merupakan daerah yang sangat luas, untuk memudahkan pengelolaan daerah maka beberapa tahun kebelakangan daerah ini dipecah menjadi dua daerah, daerah asal yang bercorak perkotaan dipertahankan dengan nama Kota sedangkan daerah baru yang terletak pada daerah pedesaan dijadikan kabupaten baru. Sehingga dengan demikian daerah yang asal lebih maju dari segi pembangunan berbanding daerah baru yang terletak di kawasan pedesaan. Kemudian yang menarik dari temuan ini adalah bahwa Kabupaten Agam yang daerahnya bercorak pertanian dan perikanan. Daerah ini memiliki angka pertumbuhan ekonomi diatas rata-rata Sumatera Barat, bahkan mencapai target pertumbuhan nasional, yaitu diatas 6%. Namun yang ditemui adalah kualitas lingkungan ekonomi dan social masyarakat tergolong rendah (Z-Skor -0.1848 dan -0.4908). Indikasi ini menunjukkan bahwa kemajuan pembangunan ekonomi tidak semestinya menjamin peningkatan status kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan (Carley 1981; Dann 1984; Abdul Rahman Embong 2003).

4.5. Status Kualitas Hidup Peringkat Ketiga: Kab Solok, Kab Sawahlunto Sijunjung, Kab Tanah Datar

Ketiga kawasan merupakan daerah pedesaan yang bercorak pertanian yang berada di sebelah Timur Sumatera Barat. Daerah Kabupaten Solok dan Sawahlunto Sijunjung dulunya pecahan (bahagian) dari Kota. Sebagai daerah pertanian, secara geografisnya keluasan daerahnya cukup luas dengan topografi yang berbukit. Kondisi ini biasanya akan menjadi halangan bagi perkembangan ekonomi dan sosial, karena masih minimnya ketersediaan infrastruktur jalan dikawasan ini. Selain itu perkembangan industri kecil juga belum berkembang pesat karena tumpuan masih pada sektor pertanian dan perkebunan, sehingga peluang pekerjaan masyarakat di daerah ini sangat terhambat. Kondisi ini diperlihatkan dari pencapaian kualitas ekonomi dan sosial ketiga daerah ini berada pada taraf kedua terendah berbanding daerah lainnya (Z-Skor - 0.6777 dan -0.4908).

4.6. Status Kualitas Hidup Peringkat Keempat: Kab Pasaman, 50 Kota, Padang Pariaman, Pesisir Selatan Dan Mentawai

Secara geografis daerah yang masuk kategori ini dikelompokkan menjadi dua bahagian, (1) daerah yang bercorak pertanian (2) daerah yang bercorak pertanian dan pesisir pantai, sedangkan topografi daerahnya berbukit. Daerah ini ditinjau dari aspek sosial ekonomi tergolong rendah, dengan kegiatan ekonomi tergantung dengan pertanian tradisional maupun perikanan tradisional. Untuk perkembangan aktivitas industri, perdagangan dan pendidikan didaerah ini kurang sehingga ekonomi kawasan berjalan lambat. Di tambah lagi peluang pekerjaan di luar sektor pertanian sangat rendah karena kurangnya investasi swasta yang masuk. Berdasarkan kategori, ke 5 daerah ini status kualitasnya paling rendah. Hampir seluruh komponen dalam pencapaian kualitas hidup memiliki nilai Z-Skor minus (dibawah nilai mean). Ini juga sejalan dengan hasil pendataan kemiskinan tahun 2005, kelima daerah ini mempunyai penduduk miskin

5 peringkat tertinggi di Sumatera Barat. Hal ini dapat dipahami, karena pada daerah-daerah ini angka kemiskinan tergolong tinggi di Sumatera Barat dan kenyataannya justru kantong kantong kemiskinan berada pada komunitas pertanian dan pesisir pantai (Elfindri & Wiko Saputra 2005; Noviarti, Wiko Saputra, Jammaludin Jahi 2007). Wujudnya ketidakseimbangan pembangunan antar kawasan juga disebabkan oleh faktor rendahnya sarana ekonomi dan sosial (Bappenas, BPS & UNDP 2006, Katiman Rostam 1997). Bila kita kaitkan dengan beberapa kawasan yang kualitas hidupnya rendah, justru secara geografis daerah tersebut tergolong cukup luas, bahkan ada yang susah untuk dijangkau kerana secara topografi daerahnya berbukit.

5. RUMUSAN DAN IMPLIKASI

Secara umum diakui, penilaian status kualitas hidup tidak hanya meliputi dimensi objektif saja namun juga merangkumi dimensi subjektif. Namun demikian, kajian ini dapat mewakili gambaran status kualitas hidup masyarakat Sumatera Barat. Pada aspek spatial ditemukan ketimpangan pembangunan antar daerah di Sumatera Barat, hal ini tergambar dari perbedaan kondisi sosial ekonomi daerah dan pencapaian status kualitas hidup masing-masing daerah. Ketimpangan pembangunan di Sumatera Barat didapati beberapa daerah yang masuk kategori tertinggal dengan kondisi sosial dan ekonomi yang rendah sehingga mengakibatkan kemajuan pembangunan berjalan lambat.

Kajian status kualitas hidup ini membuktikan bahwa dua variabel persoalan yang cukup kentara dalam pemerataan pembangunan antar daerah di Sumatera Barat ialah: persoalan ekonomi dan sosial. Persoalan ekonomi, di mana terjadi ketimpangan kesejahteraan masyarakat antar daerah yang secara ekonomi lebih maju sedangkan ada beberapa daerah yang masih tertinggal. Munculnya persoalan ini mengakibatkan pembangunan daerah daerah-daerah terpencil sangat lambat dan seakan berjalan ditempat. Kurangnya infrastruktur pendukung bagi pembangunan daerah merupakan variabel yang menyebabkan rendahnya kualitas ekonomi

masyarakat terutama daerah yang jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi walaupun dari segi ketersediaan sumber daya alam sangat kaya.

Begitu juga dengan persoalan sosial. Pembangunan bidang sosial juga sangat lambat sekali terjadi di beberapa daerah terutama pada daerah yang masuk kawasan pedesaan. Padahal *social capital* daripada pendidikan yang merupakan bentuk lain dari *investment of human capital* untuk pembangunan mampu memberi peranan yang besar dalam perbaikan pembangunan daerah. Persoalan akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan terus menjadi hambatan. Dalam bidang pendidikan, daerah yang secara geografis luas dan jauh dari pusat kota justru tidak ada atau sukar diakses akibat dari tidak adanya pemerataan terhadap fasilitas pendidikan seperti sekolah. Akibatnya muncullah angka putus sekolah yang relatif tinggi di daerah tersebut dan kecenderungan anak-anak untuk bekerja relatif besar akibat besarnya *opportunity cost* dari pendidikan. Tentunya pada masa akan datang berisiko untuk masuk kedalam lingkaran kemiskinan absolut.

Persoalan bidang kesehatan hampir sama dengan keadaan bidang pendidikan yaitu akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan belum tersedia dengan baik di daerah pedesaan. Padahal perbaikan kesehatan yang juga merupakan investasi modal insani yang dapat meningkatkan produktivitas tidak berjalan dengan baik, sehingga belum mampu menjadi *value added* dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Kompleksiti daripada persoalan tersebut telah menyebabkan munculnya ketimpangan terhadap kualitas hidup antar masyarakat kota dengan masyarakat desa. Bila ini tidak segera diberi perhatian oleh pemerintah akan muncul konflik dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan. Pemerintah perlu kembali melakukan beberapa penyesuaian kebijakan dengan mengarahkan paradigma pembangunan terfokus pada daerah yang bercorak pedesaan. Perbaikan infrastruktur merupakan langkah awal dalam perbaikan pemerataan pembangunan antar daerah

kerana ini merupakan masalah utama kenapa daerah pedesaan sangat sukar berkembang. Selanjutnya penyediaan akses fasilitas publik seperti sekolah, pasar, fasilitas kesehatan dan lainya perlu segera dibaiki untuk meneraju peningkatan modal sosial masyarakat sehingga akan muncul pembangunan yang berkelanjutan dan seimbang pada masa akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Silvia dan Toto Sugiharto, 2004, Analisis Z Skor Untuk Penilaian Kinerja Keuangan Serta Pengaruhnya Terhadap Harga Saham Perusahaan Perdagangan Di BEJ, *Majalah Ekonomi Dan Komputer No.3 Tahun Xii-2004*, Jakarta.
- Asmah Ahmad. (1999). *Ketimpangan Kesejahteraan Sosial di Malaysia: Suatu Manifestasi Pembangunan Tak Seimbang. Prosiding Seminar Kebangsaan Alam, Manusia dan Pembangunan di Malaysia: Dasar, Strategi dan Kelestariannya*. Bangi: Persatuan Kebangsaan Geografi Malaysia dan Jabatan Geografi Universiti Kebangsaan Malaysia: 129-144.
- Awang, Azahan. (2006). *Kualiti Hidup Masyarakat Bandar di Kawasan Majlis Perbandaran Seremban, Negeri Sembilan*. Tesis Doktor Falsafah, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.
- Badan Pusat Statistik. (2008). *Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2008*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bappenas, BPS & UNDP. (2006). *Laporan Pembangunan Manusia Indonesia (LPMI) 2006*. Jakarta.
- Cummin, R.A. (1999). *A Psychometric Evaluation of the Comprehensive Quality of Life Scale*. Fifth edition. In Lim, L.Y., Yuen, B. & Low (eds) *Urban Quality of Life: Critical Issues and Options*. Singapura: National University of Singapore. Hlm. 32-46.
- Carley, M. (1981). *Social Measurment and Social Indicator: Issues of Policy and Theory*. London: George Allen & Unwin Ltd.
- Dann, G. (1984). *The Quality of Life in Barbados*. London: Macmillan Publishers.
- Dowrick, Steve, Yvonne Dunlop & John Quiggin. (2003). Social Indicators and Comparisons of Living Standards. *Journal of Development Economics* 70 (2003) 501– 529.
- Elfindri & Wiko Saputra. (2005). Kemiskinan dan Strategi Penyesuaian : Studi Empiris Sumatera Barat dengan Data Susenas 1999 dan 2003, *Jurnal Ekonomi Indonesia No.2, Desember 2005*.
- Embong, A. Rahman. (2003). *Pembangunan dan Kesejahteraan: Agenda Kemanusiaan Abad ke-21*. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Hicks, A. Douglas. (1997). The Inequality-Adjusted Human Development Index: A Constructive Proposal. *World Development Vol. 25 No. 8, pp. 1283-1298 (1997)*.

- Liichters, Guido & Lukas Menkhoff. (1996). Human Development as Statistical Artifact. *World Development*, Vol. 24, No. 8, pp. 1385-1392, 1996.
- Kendrick, J.R. (2005). *Social Statistics*. New York: Pearson Education.
- Noorbakhsh, Farhad. (1998). A Modified Human Development Index. *World Development*, Vol. 26, No. 3, pp. 517-528, 1998
- Massam, H. Bryant. (2002). Quality of Life : Public Planning and Private Living. *Progress in Planning*, Vol. 58: 141-227.
- Mubyarto. (2005). *A Development Manifesto: the Resilience of Indonesia Ekonomi Rakyat During the Monetary Crisis*. Jakarta: Penerbit Kompas
- Moons, Philip, Budts, Werner, and Geest, D. Sabina. (2006). Critique on The Concept of Quality of Life : A Review and Evaluation of Different Conceptual Approaches. *International Journal of Nursing Studies.*, Vol.43: 891-901.
- Morse, Stephen. (2003). Analysis For Better or for Worse, Till the Human Development Index do us Part? *Ecological Economics* 45 (2003) pp. 281-296.
- Noviarti, Wiko Saputra, Jamaluddin Md. Jahi. (2007). *Status Kualiti Hidup Masyarakat Di Sumatera Barat: Tinjauan Mengikut Bandar Dan Luar Bandar*. Prosiding Simposium Kebudayaan Indonesia Malaysia (SKIM) ke X 29-31 Mei. Bangi: FSSK Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universitas Padjajaran.
- Noviarti, Wiko Saputra dan Abd. Rahim Md. Nor (2008). Kualiti Hidup Dalam Ketaksamaan Pembangunan : Analisis Ruang Sumatera Barat. *Isu-Isu Geografi Malaysia*. (Bab 15) 234-251.
- Pardede. (2008) Analisis Perbedaan Tingkat Kesehatan BPR di Kotamadya Binjai Berdasarkan Metode Altman Z-Score dan CAMEL, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi Departemen Manajemen USU, Medan.
- Rostam, Katiman & Abdul Hamid Abdullah. (1997). Pembangunan dan Kemunduran Desa di Wilayah yang Terpisah. *Ilmu Alam vol. 23: 59 - 94*.
- Saputra, Wiko. (2008). Analisis Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal IPTEK Terapan Vol 1. No. 2 Tahun 2008*.
- Seik, T. Foo. (2000). Subjective Assessment of Urban Quality of Life in Singapore (1997-1998). *Habitat International* 24 (2000) 31-49.
- The Economist Intelligence Unit's Index. (2005). *Quality of Life for Economic Development Planning*. London.
- UNSFIR. (2005a). *Pilihan Kebijakan untuk Mengatasi Ketimpangan di Indonesia*. Prosiding Lokakarya mengatasi Ketimpangan di Indonesia, Jakarta 14 Desember 2004.
- UNSFIR. (2005b). *Kebijakan Sosial di Indonesia. Blue Print Kebijakan Sosial di Indonesia*. Kerjasama UNSFIR dengan JAJAKI.
- UNDP. (2002). *Human Development Report 2002*. New York: United Nation.
- UNDP. (2004). *Human Development Report 2004*. New York: United Nation.

UNDP. (2008). *Human Development Report 2008*. New York: United Nation.

UNDP. (2010). *Human Development Report 2010*. New York: United Nation.

WHO (2010). *Health Development Report 2010*. New York: United Nation.

Wiley, John dan Sons, 1983, *Corporate Financial Distress, A Complete Guide to Predicting, Avoiding, and Dealing with Bankruptcy*, A Wiley-Interscience Publication.

World Bank. (2003). *Kota-kota dalam Transisi: Tinjauan Sektor Perkotaan pada Era Desentralisasi di Indonesia. Urban Development Working Papers No. 7*. Washington D.C: The World Bank.



P R A K A R S A

Welfare Initiative for Better Societies

Perkumpulan PRAKARSA

Jln. Rawa Bambu I Blok A No. 8-E
Rt. 010 Rw. 06 Kel./Kec. Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12520, Indonesia
Ph. +62 21 7811 798
Fax +62 21 7811 897
www.theprakarsa.org